

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto meskipun responden mengerti ataupun tidak tetap tidak ada pengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Seharusnya anggaran daerah bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang di harapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas.
2. Pemahaman SAPD berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik akan mendukung terlaksananya peraturan dan kebijakan dan mendukung semakin tingginya pemahaman yang baik bagi para pengelola keuangan
3. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Karena pemerintah belum maksimal dalam menjalankan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik
4. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemahaman Sistem Akuntansi Daerah dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto dari hasil tersebut disimpulkan bahwa secara simultan atau secara bersama – sama berpengaruh signifikan.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian di atas adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya di harapkan dapat menambah variabel sehingga dapat mengungkapkan variabel-variabel yang tidak ada dalam penelitian ini yang masih tergolong rendah sehingga peneliti selanjutnya masih dapat mencari faktor - faktor lain yang mempengaruhi kinerja pengelola keuangan. Peneliti selanjutnya juga dapat memakai indikator yang berbeda pada setiap variable yang ada.
2. Para pengelola keuangan yang terdiri dari pegawai yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Mojokerto memiliki latar belakang berbeda-beda atau tidak hanya berasal dari latar belakang ilmu akuntansi. Dengan demikian apabila pegawai yang bukan berasal dari ilmu akuntansi sehingga hendaknya dapat diberikan lagi pembekalan yang cukup mengenai dasar-dasar akuntansi melalui pelatihan – pelatihan.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto agar memberikan perhatian pada beberapa hal diantaranya Kejelasan sasaran anggaran, Pemahaman SAPD serta Akuntabilitas. Selain itu kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto terutama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi publik melalui program dan kegiatan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Gunawan, & Darwanis, Syukriy Abdullah 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Di lingkungan Pemerintah Aceh. *Jurnal Magister Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 3, No. 4, November 2014.
<https://www.researchgate.net/publication/319007057>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.05/2011 mengenai Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standart akuntansi pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Putra, Nopriansyah. 2016. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Pada Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Ekonom*, Vol 19, No 4, Oktober 2016
- Rafar, T. M., Fahlevi, H., & Basri, H. 2015. Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Administrasi Akuntansi*, 4(2).

Sari E. Aprila N.& Saiful. 2013. "Pengaruh Pemahaman SAP dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris di Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu)". *Jurnal Fairness*. Volume 3, Nomor 3, 2013 ; 19-29. <https://scholar.google.ac.id>

Tari M. Heru F. & Hasan B. 2015. "Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)". *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume 4, Nomor 2, Mei 2015. <https://scholar.google.ac.id>

Winanti, Sri. 2014. "Pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, pemahaman pengelolaan keuangan daerah, pelatihan, dan komitmen organisasi terhadap kinerja pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah". Skripsi. FE, Akuntansi, Dan Universitas Bengkulu <https://scholar.google.ac.id>

Undang-Undang Republik Indonesia UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Yuni Shara. 2018. "Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumber daya Manusia, pemahaman sistem akuntansi pemerintahan daerah, dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan". *Tesis*. Universitas Sumatera Utara, Medan www.repository.usu.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Gunawan, & Darwanis, Syukriy Abdullah 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Di lingkungan Pemerintah Aceh. *Jurnal Magister Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 3, No. 4, November 2014.
<https://www.researchgate.net/publication/319007057>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.05/2011 mengenai Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standart akuntansi pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Putra, Nopriansyah. 2016. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Pada Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Ekonom*, Vol 19, No 4, Oktober 2016
- Rafar, T. M., Fahlevi, H., & Basri, H. 2015. Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Administrasi Akuntansi*, 4(2).

Sari E. Aprila N.& Saiful. 2013. "Pengaruh Pemahaman SAP dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris di Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu)". *Jurnal Fairness*. Volume 3, Nomor 3, 2013 ; 19-29. <https://scholar.google.ac.id>

Tari M. Heru F. & Hasan B. 2015. "Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)". *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume 4, Nomor 2, Mei 2015. <https://scholar.google.ac.id>

Winanti, Sri. 2014. "Pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, pemahaman pengelolaan keuangan daerah, pelatihan, dan komitmen organisasi terhadap kinerja pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah". Skripsi. FE, Akuntansi, Dan Universitas Bengkulu <https://scholar.google.ac.id>

Undang-Undang Republik Indonesia UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Yuni Shara. 2018. "Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumber daya Manusia, pemahaman sistem akuntansi pemerintahan daerah, dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan". *Tesis*. Universitas Sumatera Utara, Medan www.repository.usu.ac.id